

PERAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBANGUNAN FASILITAS PERTANIAN DI KABUPATEN BANGKALAN

Nurul Arifiyanti, Ifan Rizky Kurniyanto*, Resti Prastika Destiarni
Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Indonesia

ABSTRAK

Peran pemerintah pada pembangunan fasilitas utamanya di sektor pertanian di Kabupaten Bangkalan masih belum optimal. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bangkalan masih berada dibawah rata-rata sebesar 63,79, sedangkan di dua kabupaten lainnya di Pulau Madura yakni Kabupaten Pamekasan 65,94 dan Kabupaten Sumenep sebesar 66,22. Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan dan peran pemerintah terhadap pembangunan fasilitas pertanian di Kabupaten Bangkalan menggunakan metode Zielobjective Orientierte Project Planning (ZOPP). Peran pemerinah dalam pengembangan fasilitas pertanian di Kabupaten Bangkalan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan perhatian pemerintah dalam terhadap pertanian melalui pengoptimalan bantuan pertanian dan peran penyuluhan pertanian sehingga hasil pertanian dan SDM petani dapat meningkat.

Kata kunci: Pemerintah, Fasilitas Pertanian, Pembangunan Pertanian

THE ROLE OF THE GOVERNMENT ON AGRICULTURAL FACILITIES DEVELOPMENT IN BANGKALAN REGENCY

ABSTRACT

The role of government on development of agricultural sector in Bangkalan Regency is still not optimal. The Human Development Index in Bangkalan Regency is still below the average of 63.79, while in two other districts on Madura Island, namely Pamekasan Regency 65.94 and Sumenep Regency of 66.22. This study want to analyze the problems and role of the government in the development of agricultural facilities in Bangkalan Regency using the Zielobjective Orientierte Project Planning (ZOPP) method. The role of the government in the development of agricultural facilities in Bangkalan Regency could be increase by increasing government attention to agriculture through optimizing agricultural assistance and the role of agricultural extension so that agricultural output and farmers' human resources could be increase.

Keywords: Role of Government, Agricultural Facility, Agricultural Developmen

PENDAHULUAN

Pembangunan desa dititikberatkan pada bagaimana masyarakat mampu mengelola sumber daya yang ada di desa meliputi Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), dan Sumber Daya Teknologi (SDT) secara efektif dan juga efisien. Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pentingnya upaya pemerintahan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, melayani masyarakat desa dan meningkatkan daya saing desa. Pembangunan sebuah wilayah bertujuan untuk membangun wilayah agar menjadi sebuah wilayah sejahtera dan mandiri. *Governance* adalah kemampuan pemerintah untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan dan mempengaruhi

* Corresponding author:

ifan.kurniyanto@trunojoyo.ac.id

masyarakat, khususnya dalam penyediaan pelayanan publik. Tujuan ini hanya dapat dicapai jika tugas tersebut dilaksanakan dengan baik di bawah tanggung jawab pemerintahan desa.

Dalam masyarakat Madura, citra opini adalah citra pemimpin. Dalam hal ini pemimpin dapat diartikan sebagai pemuka agama, pemuka desa atau klebun. Adanya pemimpin tersebut diharapkan mampu menyelesaikan masalah administrasi dan pribadi yang terjadi. Untuk itu lokasi merupakan salah satu unsur yang harus dikembangkan sebagai bagian dari upaya pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam tulisan Uluwiyah dkk (2013:89).

Pemberdayaan adalah upaya untuk memperkuat keterampilan yang ada dan mengubahnya menjadi kekuatan. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan tersebut memungkinkan individu atau kelompok untuk mengatasi tantangan lingkungan yang ada dan menjalani kehidupan yang lebih baik seperti yang diharapkan. Proses pemberdayaan mendorong kepercayaan pada kemampuan seseorang untuk menghadapi tantangan di sekitarnya. Menurut Sugiri (2012), tujuan dari pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kekuasaan dan dukungan untuk mendapatkan keputusan atau tindakan yang mempengaruhi masyarakat melalui pengaruh lingkungan. Upaya pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan pertanian akan berhasil apabila masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai aktivitas pemberdayaan. Dari konteks di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat berarti individu atau kelompok.

Sebagai negara kepulauan, diperlukan adanya pengembangan sumber daya di Indonesia dari berbagai sektor seperti sektor pertanian, sektor perikanan dan peternakan. Banyaknya penduduk Indonesia yang tinggal di pedesaan dengan mata pencaharian mereka dari bidang pertanian. Lemahnya sektor pertanian di pedesaan membuat adanya usulan strategi pengembangan yang ditargetkan untuk pembangunan fasilitas sektor pertanian pedesaan sebagai langkah konkrit menuju terwujudnya pertanian unggul di Indonesia. Dengan terus memetakan potensi desa, pengembangan fasilitas pertanian dapat memberikan dampak terbesar bagi kesejahteraan petani dan masyarakat desa dengan memulai di tingkat daerah atau di tingkat terendah (Aditya, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam perencanaan pembangunan pertanian yang menjadi target capaian dengan mengidentifikasi seluruh permasalahan dan solusi pencapaian di Kabupaten Bangkalan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan Pertanian

Pertanian sebagai sektor prioritas di negara agraris menjadi pembuka dalam keberhasilan ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian merupakan perubahan sosial menuju pertumbuhan, kemajuan, perkembangan, distribusi ekonomi, peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat dan kelestarian lingkungan (Dumasari, 2020; Lantarsih et al., 2021). Proses perubahan multi aspek terkait erat dengan pemanfaatan inovasi teknologi baru tepat guna. Multi dimensi pada realisasi pembangunan pertanian juga mencakup sosial, ekonomi, lingkungan, budaya, politik, teknologi dan ilmu pengetahuan.

Hakikat pembangunan pertanian mengacu pada kesadaran perencanaan dan pelaksanaan perubahan yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan petani hingga rakyat dalam jangka panjang, didukung oleh peran serta pemerintah dan masyarakat dengan teknologi terpilih. Penerapan pembangunan pertanian dapat dilakukan dengan metode intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, teknologi selektif dan manajemen profesional.

Salah satu faktor yang menjadi hambatan dalam pembangunan pertanian antara lain penyebaran Covid 19 mengakibatkan terganggunya produksi, distribusi serta harga. Kendala lain juga terjadi pada penurunan jumlah tenaga kerja pertanian yakni regenerasi yang berkurang serta alih fungsi lahan pertanian. Strategi pemulihan pembangunan pasca covid 19 dapat dilakukan dengan pengembangan sumber daya manusia, peningkatan komunikasi pertanian, serta membutuhkan peran hexa helix di seluruh sub sistem baik hulu, hilir dan sarana penunjang (Kumalasasi, 2020; Sidharta et al., 2021).

Pihak yang berperan pada pembangunan pertanian antara lain pemerintah, petani dan masyarakat. Peran pemerintah sangat dominan terhadap pembangunan pertanian, salah satunya dengan kebijakan akses pasar bagi petani dengan menjadi pemerintah yang berkolaboratif dengan teknologi dan investor (Iyoega et al., 2020). Kebijakan pembangunan pertanian berbasis inovasi teknologi yang dirasakan oleh petani dan masyarakat dalam bentuk peningkatan produksi, peningkatan pendapatan petani dan kemampuan petani sehingga tingkat ketahanan pangan meningkat (Mucharam et al., 2022; Sihombing, 2022)

Keberhasilan dalam mengembangkan dan memberdayakan masyarakat tani terletak pada tangan para trainer dan para ahli sebagai mitra, setidaknya sampai masyarakat mampu mengelola usaha dan organisasinya secara profesional dan mandiri (Jannah et al., 2022). Salah satunya dengan program penyuluhan. Program penyuluhan pertanian menjadi penting pada keberhasilan pembangunan pertanian meskipun adanya perbedaan wujud kegiatan baik dalam tingkat makro dan mikro. Peran penyuluh berada pada posisi sebagai fasilitator, motivator, konsultan dan inovator dengan faktor yang mempengaruhi kinerja yakni frekuensi pelatihan kerja dengan (Kinasih et al., 2021; Sofia et al., 2022). Paradigma pada kebijakan melalui budidaya intensif, berorientasi pasar dan efisiensi produksi namun pada kenyataannya pada tingkat lokal hanya sebagai orientasi proyek (Pratama & Brillian, 2022).

Penerapan pembangunan pertanian harus mencakup pada manfaat ekonomi, sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan yang bermakna dan berkelanjutan. Perlunya melakukan pengelolaan sumber daya alam dan manusia untuk memperkuat peran kelembagaan, efektivitas dan efisiensi energi alternatif dan terbarukan. Perlunya penyesuaian regulasi dan efisiensi program pembangunan yang komprehensif dan terstruktur sesuai regulasi, infrastruktur dan lembaga lain dan sesuai dengan jenis, waktu, jumlah dan subjek. Dengan tambahan Pendapatan dan kesejahteraan petani, untuk dapat mencapai swasembada pangan dan energi, ketahanan pangan (Elizabeth & Anugrah, 2020).

Metode ZOOOP

Zielobjective Orientierte Project Planning (ZOPPP) diterapkan oleh *Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)* memiliki karakteristik yang

terdiri dari prosedur perencanaan bertahap, partisipatif dan teamwork, visualisasi, serta moderasi. Metode ini yang disebut juga dengan GOPP (*Goal Oriented Project Planning*) atau Perencanaan Proyek Beorientasi pada Tujuan merupakan metode perencanaan sistematis diawali dengan mengidentifikasi, merencanakan dan mengatur pelaksanaan proyek dengan memperhatikan kepentingan pihak. ZOPP menghasilkan matriks kolaboratif berdasarkan kerangka kerja logis, yang mengidentifikasi indikator kinerja utama dan menyusun elemen utama organisasi atau proyek untuk mencapai tujuan. Metode ZOPP memiliki 2 fase yakni analisis dan perencanaan proyek. Pada fase analisis terbagi dalam analisis partisipasi, analisis sudut pandang, analisis tujuan dan analisis alternatif (Ismail, 2011; Mukhsin et al., 2021; Rajagopal, 2019).

Prinsip dasar metode ZOPP mengedepankan partisipasi masyarakat yang sesuai dengan kultural Indonesia. Menformulasikan strategi berdasarkan hasil analisis yang menghubungkan kebutuhan dengan penerima dan fleksibel digunakan. Metode yang praktis dan realistis yang bermanfaat untuk melihat permasalahan dan tujuan dengan jelas. Memudahkan penentuan alternatif strategi dan prioritas program. Mengharmonisasikan perbedaan pandangan dan harapan sehingga mendinging kerjasama tim dengan tingkat objektivitas yang tinggi (Sumpeno, 2004).

Metode ZOPP digunakan dalam menguji kelayakan proyek pembangunan daerah berorientasi pada tujuan dan perencanaan partisipatif. Mengkaji keadaan desa melalui informasi ringkas mengapa program tersebut dibuat, output yang ingin dihasilkan dan cara untuk mencapai output tersebut. Farid (2021) menerapkan metode ZOPP untuk melihat kelayakan proyek pembangunan desa melalui program Rumah Tanam Metode Smart Farming 4.0 melalui analisis partisipatif, masalah, tujuan dan alternatif dihasilkan program tersebut dapat diterapkan di Desa Padang Tumbuo.

Perencanaan dengan metode ZOPP diterapkan dalam meningkatkan kerjasama semua pihak yang terkait, keadaan yang ingin diperbaiki dan tindakan yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan program sehingga mutu dari informasi sangat menentukan output yang dihasilkan. Perencanaan pembangunan harus dilaksanakan secara partisipatif dan melibatkan seluruh masyarakat sehingga timbul rasa tanggung jawab bersama. Akselerasi pembangunan desa dilakukan oleh Fikri dan Yatimah (2020; 2021) dengan mengintegrasikan seluruh pihak terkait sehingga berpengaruh terhadap interaksi saat perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif. Adapun jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang berasal dari studi literatur, artikel serta website resmi pemerintah Kabupaten Bangkalan dan Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis data dilakukan dengan metode *Zielobjectieve Orienteerte Project Planning* (ZOOP) berupa analisis permasalahan peran pemerintah terhadap pembangunan fasilitas pertanian di Kabupaten Bangkalan. Metode ini secara resmi diperkenalkan di Jerman pada tahun 1983 oleh Gesellschaft fur dan metode ini merupakan perencanaan proyek yang berorientasi pada tujuan. Kekuatan ZOPP terletak pada terjaminnya konsistensi cara berfikir dan bekerja serta kesamaan pemahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan

oleh ZOPP dan selain meningkatkan kualitas perencanaan juga memfasilitasi komunikasi dan kerjasama antara berbagai peserta proyek. Hasil dari kegiatan perencanaan yang dilakukan dengan metode ZOPP merupakan kerangka acuan logis (*logical framework*) yaitu matriks perencanaan yang menggambarkan kerangka umum proyek.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Masalah

Peran pemerintah pada pembangunan fasilitas utamanya di sektor pertanian di Kabupaten Bangkalan masih belum sempurna. Seperti yang dirujuk dari data Badan Pusat Statistika (BPS) Jawa Timur mengatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bangkalan masih dibawah rata - rata sebesar 63,79 dengan Kabupaten Pamekasan yang lebih unggul yakni sebesar 65,94 sedangkan Kabupaten Sumenep sebesar 66,22 (Rohmah & Cahyono, 2021). Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang sumbernya dari APBN disebutkan bahwa dana desa setiap kabupaten / kota dihitung berdasar kepada jumlah desa serta akan dialokasikan secara berkeadilan yakni dengan prosentase mencapai 90% dari dana desa kemudian dialokasikan secara merata kepada setiap desa dan prosentase 10% sisanya dihitung dengan turut memperhatikan luas dari wilayah, angka kemiskinan, jumlah penduduk setempat, serta tingkat kesulitan capaian geografis.

Adapun permasalahan alokasi dana tersebut berdampak secara nyata utamanya bagi masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Adapun salah satu studi kasus dalam kajian artikel oleh (Fawaidurrohman, 2022), menyebutkan bahwa di Desa Serabi Timur pemerintahan desa belum mempunyai program yang memprioritaskan pemberdayaan masyarakat di daerahnya yang tentunya harus sejalan dengan prioritas penggunaan dana desa. Hal tersebut disebabkan oleh minimnya pengetahuan pemerintah guna melakukan operasi gabungan dari kebutuhan lokal perencanaan desa dalam dokumen RPJMDes serta APBDDes. Buktinya ialah pada tahun 2019, pada Desa Serabi Timur, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan mengalami kekeringan saat musim kemarau tiba dan menyebabkan pertanian mengalami kesulitan pengairan. Hal ini disebabkan tidak adanya jaringan irigasi. Hal serupa juga terjadi di Kecamatan Tragah. Dan persoalan irigasi selalu menjadi bahan bahasan faktual yang harus segera ditangani.

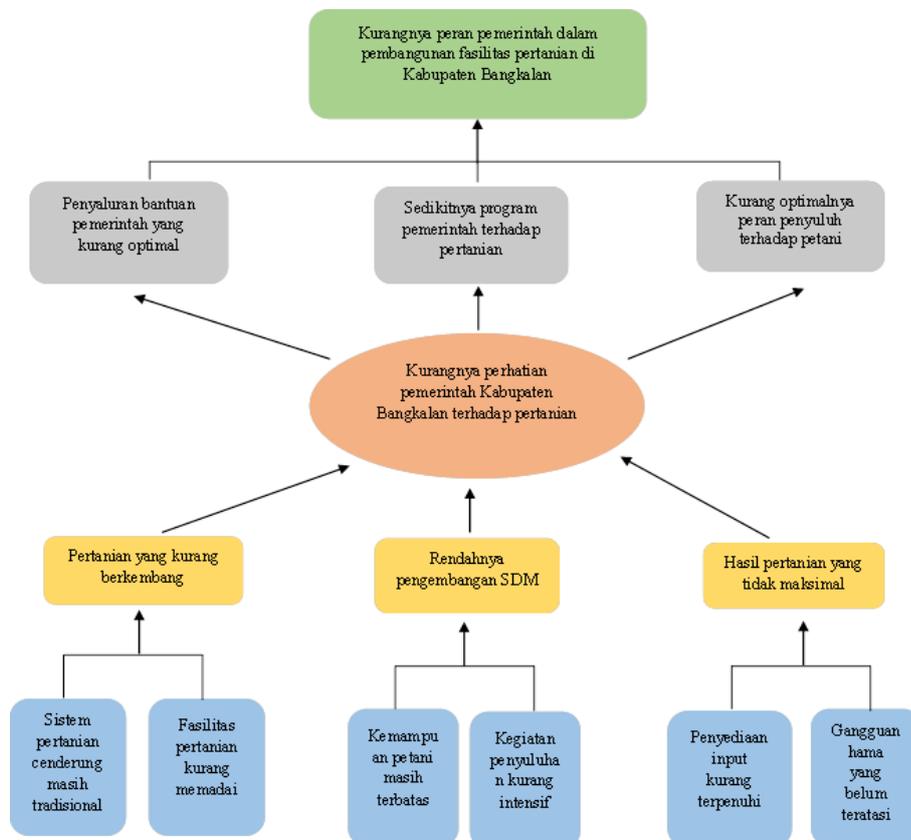
Selain persoalan irigasi, keadaan faktual lainnya yang masih dapat diamati dalam pertanian area Bangkalan ialah peran serta penyuluh bagi kelangsungan sektor pertanian yang tergolong kategori sedang menurut (Halimah & Subari, 2020). Hal tersebut didasari oleh kinerja penyuluh yang hanya sekedar memberikan fasilitas berupa membantu petani agar masuk dalam kelompok tani saja dengan tidak menyertakan pembekalan pengetahuan perihal pentingnya proses pertanian yang baik. Selain itu penyuluh juga tidak memperhatikan kebutuhan petani dari awal sampai proses pemasaran dengan studi kasus di daerah Desa Gili Barat. Contoh lain dari minimnya keikutsertaan fasilitator penyuluh ialah membantu kelompok tani membuat proposal guna meminta bantuan dari Dinas Pertanian Provinsi, akan tetapi tidak membantu

untuk mengajukannya pula, sehingga tidak menuai respon yang baik dari pihak yang berkaitan.

Peran penyuluh sebagai dinamisator berkategori sedang dengan capaian prosentase sebesar 53,5%. Harusnya peran tersebut perlu untuk ditingkatkan lagi dengan mencoba menghubungkan para petani desa kepada beberapa pihak yang mampu mendukung perbaikan serta menyokong kemajuan usahatani yang dilakukan oleh para petani. Di sisi lain, pada Desa Kramat di Bangkalan menemui permasalahan kurangnya penyuluh pertanian. Sebab untuk tiga dusun diketahui hanya memiliki satu penyuluh pertanian dan datang hanya untuk menanyakan kondisi pertanian dan berdiskusi saja.

Adapun permasalahan di Desa Gili Timur mencakup adanya hama yang mengganggu pertanian, penyediaan input kurang terpenuhi (pada studi kasus kelompok tani Bumi Emas), kurangnya pengetahuan petani akan pertanian yang baik, serta sistem pertanian yang masih bersifat tradisional.

Sedangkan yang perlu dipertanyakan ialah fokus pemerintah yang seharusnya masih pada fasilitas pertanian dan pemecahan masalah tersebut, namun justru dari pihak Dinas Pertanian berfokus untuk mulai melakukan digitalisasi pada sektor pertanian (Soedarto & Hendrarini, 2020) dengan sistem berbasis android. Kemajuan zaman memang tidak bisa ditampik, namun pemerhatian serta prioritas kebutuhan masyarakat juga penting dilakukan. Maka, dengan itu berikut merupakan bagan analisis masalah yang terjadi di Kabupaten Bangkalan:



Sumber: Data Primer (2023)

Gambar 1

Analisis Masalah Pembangunan Fasilitas Pertanian Di Kabupaten Bangkalan

Permasalahan yang ada dimulai dari kegiatan masyarakat berupa sistem pertanian yang masih tradisional dan fasilitas pertanian sendiri yang kurang memadai, hal tersebut menyebabkan pertanian kurang berkembang. Kemudian ada kemampuan petani yang masih sangat terbatas serta kegiatan penyuluhan yang kurang intensif menyebabkan rendahnya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Permasalahan masyarakat yang terakhir ialah ketersediaan input yang kurang memadai serta gangguan hama yang belum teratasi menyebabkan hasil pertanian yang tidak maksimal. Ketiga elemen tersebut mengacu pada permasalahan kurangnya perhatian pemerintah Kabupaten Bangkalan terhadap pembangunan pertanian dibuktikan dengan penyaluran bantuan pemerintah yang kurang optimal, program pertanian yang masih sedikit, dan kurang optimalnya peran penyuluh terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh petani. Secara garis besar semua permasalahan merujuk pada kurangnya peran pemerintah dalam pembangunan fasilitas pertanian di Kabupaten Bangkalan.

Analisis Tujuan

Dalam pengkajian permasalahan yang ada, maka pemetaan masalah digunakan untuk merumuskan tujuan yang akan dicapai dalam sektor pertanian khususnya di Kabupaten Bangkalan. Seperti halnya bahan rujukan literatur dari (Ramadhana, 2021), dalam mengentaskan permasalahan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan maka pengembangan teknologi pertanian adalah pilihan yang sesuai mengingat permasalahan seputar pertanian memerlukan pembangunan yang cukup intensif guna meningkatkan hasil panen, dengan memperhatikan kondisi lahan agar terberdayakan dan tidak rusak, teknologi tidak cenderung mendorong masyarakat ke arah urbanisasi (sebab panen melimpah karena teknologi mutakhir). Semua itu juga tidak terlepas dari peranan pemerintah sebagai tonggak yang mampu mengembangkan pertanian menjadi lebih baik lagi dan berlaku sebagai penyedia sarana dan prasarana yang layak bagi pertanian di Kabupaten Bangkalan.

Menurut (Mutmainnah & Sugiarti, 2020) ada salah satu metode pemberantasan hama yang alami dan tidak merusak alam, yakni dengan menanam tanaman refugia yang dikenal memiliki manfaat bagi hama sebagai tempat berlindung serta sumber mendapatkan bahan makanan berupa nektar. Tanaman refugia yang diletakkan di sekitaran lahan sawah berfungsi sebagai daya tarik bagi musuh alami tanaman utama. Mengingat teknik ini juga merupakan salah satu bentuk kegiatan konservasi lingkungan. Dengan demikian sedikit ulasan terkait dengan metode pemecahan masalah, maka berikut disajikan bagan analisis tujuan dari pemetaan permasalahan pertanian di Kabupaten Bangkalan:



Sumber: Data Primer (2023)

Gambar 2

Analisis Tujuan Pembangunan Fasilitas Pertanian Di Kabupaten Bangkalan

Adapun pada bagian aktivitas, tujuan yang diharapkan ialah sistem pertanian yang semakin baik lagi (modern) dan fasilitas pertanian semakin memadai sehingga pertanian dapat berkembang. Kemampuan petani dalam menggarap lahan dan seputar pertanian meningkat serta penyuluh pertanian dapat lebih intensif dan interaktif kepada petani agar mampu meningkatkan pengembangan SDM. Dan kegiatan ketiga oleh masyarakat ialah terpenuhinya ketersediaan input pertanian yang layak serta penanggulangan hama yang lebih efisien guna memaksimalkan hasil pertanian. Semua kegiatan dan keluaran yang telah disebutkan diharapkan mampu mencapai sasaran berupa meningkatnya perhatian pemerintah Kabupaten Bangkalan terhadap pertanian. Adapun tujuan yang diharapkan adalah optimalnya penyaluran bantuan pemerintah, meningkatnya program pemerintah terhadap pertanian, dan optimalnya peran penyuluh terhadap petani agar dapat mencapai tujuan umum berupa meningkatnya peran pemerintah dalam pembangunan fasilitas pertanian di Kabupaten Bangkalan.

Matriks Perencanaan Pembangunan (MPP)

Setelah mendapatkan pemetaan masalah serta tujuan yang akan dicapai, maka dapat dirumuskan matriks perencanaan proyek yang mencakup ringkasan penjelasan proyek serta bagian - bagian penting dalam perencanaan yang dimaksud. Maka, dibuatlah perencanaan proyek yang diharapkan mampu terlaksana dalam kurun waktu pengajuan selama 1 tahun dan berkelanjutan. Berikut matriks perencanaan proyek pengentasan permasalahan fasilitas pertanian di Kabupaten Bangkalan.

Tabel 1
Matriks Perencanaan Proyek

Nama Proyek : Perencanaan pengembangan fasilitas pertanian di Kabupaten Bangkalan Lokasi : Kabupaten Bangkalan Periode : Januari 2023 – Desember 2023			
Strategi	Indikator-Indikator Objektif	Sumber Pembuktian	Asumsi Penting
<i>Overall Goal</i> Meningkatkan peran pemerintah dalam pembangunan fasilitas pertanian di Kabupaten Bangkalan	Meningkatnya peran pemerintah dalam membangun fasilitas pertanian di Kabupaten Bangkalan	Buku laporan pemerintan Kabupaten Bangkalan	
<i>Goals</i> 1. Optimalnya penyaluran bantuan pemerintah kepada pertanian di Kabupaten Bangkalan 2. Semakin meningkatnya program pemerintah terhadap pertanian di Kabupaten Bangkalan 3. Optimalnya peran penyuluh pertanian terhadap pertanian di Kabupaten Bangkalan	1. Penyaluran bantuan pemerintah semakin optimal terhadap pertanian di Kabupaten Bangkalan 2. Bertambahnya program pemerintah terhadap pertanian di Kabupaten Bangkalan 3. Semakin optimalnya peran penyuluh pertanian	1. Laporan pemerintah Kabupaten Bangkalan 2. Survei kondisi pertanian	
<i>Purpose</i> Meningkatnya perhatian pemerintah terhadap Kabupaten Bangkalan terhadap pengembangan fasilitas pertanian, berguna dalam perkembangan pertanian.	Semakin meningkatnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan dan pembangunan fasilitas pertanian di Kabupaten Bangkalan.	1. Survei terhadap kondisi pertanian 2. Semakin meningkatnya pembangunan fasilitas pertanian	Terdapatnya pembangunan dan pengembangan fasilitas pertanian pada tiap kecamatan dan desa di Kabupaten Bangkalan
<i>Output</i> 1. Kondisi pertanian semakin	1. Semakin meningkatnya	1. Laporan pemerintah	

<p>berkembang</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan kondisi sumber daya manusia 3. Semakin maksimalnya hasil pertanian 	<p>perkembangan pertanian yang meliputi teknologi dan ilmu dalam pertanian</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kemampuan dan kualitas SDM semakin meningkat 3. Meningkatnya angka produksi pertanian di Kabupaten Bangkalan 	<p>Kabupaten Bangkalan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Laporan pemerintah kecamatan mengenai hasil produksi pertanian 	
<p>Aktivitas</p> <p>Output 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan system pertanian yang modern 2. Fasilitas pertanian semakin memadai dalam menunjang kegiatan pertanian di Kabupaten Bangkalan <p>Output 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin meningkatnya kemampuan petani di bidang pertanian 2. Semakin intensifnya kegiatan penyuluhan pertanian <p>Output 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi penyediaan input pertanian di Kabupaten Bangkalan 2. Meningkatkan rencana penanggulangan hama pada pertanian di Kabupaten Bangkalan 		<p>Adanya bantuan serta peran pemerintah dalam rencana pembangunan dan pengembangan fasilitas pertanian</p>	

Sumber : Data Primer (2023)

Berdasarkan matriks perencanaan pembangunan tersebut diketahui bahwa kegiatan yang diharapkan meliputi penggunaan sistem pertanian yang sudah merambah fase modern, adanya fasilitas yang dinilai cukup memadai bagi kegiatan pertanian di Kabupaten Bangkalan, kemampuan petani yang mulai meningkat karena adanya pemberdayaan dan campur tangan pihak terkait seperti Badan Penyuluh Pertanian (BPP), pemenuhan penyediaan input pertanian, serta matangnya perencanaan pemberantasan hama. Dengan asumsi penting yang didapat berupa adanya bantuan serta peran dari pemerintah dalam rencana pembangunan serta pengembangan pemenuhan fasilitas pertanian.

Output yang diharapkan berupa kondisi pertanian yang semakin maju, meningkatnya kondisi SDM, serta maksimalnya hasil pertanian. Adapun beberapa indikator objektif yang diperoleh nantinya berupa semakin

berkembangnya pertanian yang berbasis teknologi dan keilmuan, kemampuan SDM meningkat, serta produksi yang semakin maju. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya laporan dari pemerintah Kabupaten Bangkalan dan pemerintah kecamatan mengenai hasil produksi pertanian.

Purpose, berupa meningkatnya perhatian pemerintah Kabupaten Bangkalan terhadap pengembangan fasilitas pertanian, berguna dalam perkembangan pertanian. Dengan indikator peningkatan perhatian pemerintah pada pengembangan dan pembangunan ditandai dengan sumber bukti berupa survei terhadap kondisi pertanian dan semakin meningkatnya pembangunan fasilitas pertanian. Adapun asumsi penting yang diperoleh ialah terdapat pembangunan serta pengembangan fasilitas pertanian pada setiap kecamatan di Kabupaten Bangkalan.

Goal yang ingin dicapai ialah optimalnya penyaluran bantuan pemerintah kepada pertanian, semakin tingginya program pertanian oleh pemerintah, dan optimalnya peran penyuluh pertanian. Indikator yang ada ialah penyaluran bantuan tersampaikan, bertambahnya program pemerintah, serta peningkatan peran penyuluh. Semua kegiatan tersebut dibuktikan dengan laporan oleh pemerintah serta survei kondisi pertanian.

Overall Goal, atau tujuan yang ingin dicapai ialah dengan meningkatkan peran pemerintah dalam pembangunan fasilitas pertanian di Kabupaten Bangkalan melalui indikator objektif berupa peran nyata pemerintah dalam merealisasikan pembangunan fasilitas pertanian. Kegiatan tersebut berlandaskan bukti dari buku laporan pemerintah Kabupaten Bangkalan

PENUTUP

Pembangunan sebuah wilayah bertujuan untuk membangun wilayah agar menjadi sebuah wilayah sejahtera dan mandiri. *Governance* adalah kemampuan pemerintah untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan dan mempengaruhi masyarakat, khususnya dalam penyediaan pelayanan publik. Tujuan ini hanya dapat dicapai jika tugas tersebut dilaksanakan dengan baik di bawah tanggung jawab pemerintahan desa. Kemampuan petani dalam menggarap lahan dan seputar pertanian meningkat serta penyuluh pertanian dapat lebih intensif dan interaktif kepada petani agar mampu meningkatkan pengembangan SDM. Terpenuhinya ketersediaan input pertanian yang layak serta penanggulangan hama yang lebih efisien guna memaksimalkan hasil pertanian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada pihak yang membantu dan bekerjasama dalam penulisan artikel ini. Informan, penyedia layanan data swasta dan pemerintah serta rekan Prodi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura telah memberikan support hingga terselesaikannya paper ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminulloh, A., & Nurrohman. (2016). *Kontektualisasi Sistem Muzara'ah: Perbandingan Kerjasama Pertanian Antara Nigeria dan Malaysia*. 4(2), 110-126. <https://doi.org/10.29244/jam.4.2.110-126>
- Dumasari. (2020). *Pembangunan Pertanian : Mendahulukan yang Tertinggal*. Pustaka Pelajar.

- Elizabeth, R., & Anugrah, I. S. (2020). Pertanian Bioindustri meningkatkan Daya Saing Produk Agroindustri dan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan. *Mimbar Agribisnis*, 6(2), 871–889. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/ma.v6i2.3603>
- Fahmie, A. (2001). Analisis Permasalahan Pengambilan Bantuan Modal Kerja Bergulir Dengan Metode Zopp: Studi Kasus Di Bkm Berkah Mulyo, Yogyakarta. *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 6(12), 63–83. <https://doi.org/10.20885/psikologika.vol6.iss12.art6>
- Farid, E. S., Hamzah Karim, S. A., Rustam, R., & Suardi, S. (2022). Peningkatan Pendapatan Petani Kecil Melalui Program Rumah Tanam Metode Smart Farming 4.0. *Agroland: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, 28(3), 268–277. <https://doi.org/10.22487/agrolandnasional.v28i3.803>
- Farid, E. S., Karim, S. A. H., Rustam, & Suardi. (2021). Peningkatan Pendapatan Petani Kecil Melalui Program Rumah Tanam Metode Smart Farming 4.0. *Agroland: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, 28(3), 268–277. <https://doi.org/http://doi.org/10.22487/agrolandnasional.v28i3.803>
- Fikri, D., Romain, I. A. S., Wulandari, Selaswati, Tasari, A. E., Renhoat, A. A., Masrani, M., Roat, M. Z. A., Hartono, Hamseh, A., & Mila, M. A. S. (2020). Penguatan Partisipasi Masyarakat Melalui Pembangunan. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 98–109. <https://doi.org/https://doi.org/10.33474/jp2m.v1i2.6558>
- Fawaidurrohman, A. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Di Desa Srabi Timur Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.
- Handoyo, G., Santosa, P. B., & Setiawan, A. H. (2019). Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengembangan Pertanian Organik di Kabupaten Boyolali. *Seminar Nasional ...*, 267–271. <https://proceedings.undip.ac.id/index.php/semnasppm2019/article/download/109/130>
- Ilmu, S., Nagara, A., Ilmu, F., & Surabaya, U. N. (2019). *Peran Pemerintah Desa dalam ... PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI DESA WISATA (studi di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo) Moch Yusuf Syaifudin Muhammad Farid Ma ' ruf*. 17–30.
- Ismail, R. (2011). *Panduan Pengembangan Kebijakan REDD+ di Daerah secara Partisipatif dan Multi Pihak*. Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan.
- Iyoega, R. R., Trilestari, E. W., & Kirana, C. A. D. (2020). Collaborative Governance dalam Pembangunan Sektor Pertanian di Kabupaten Bandung. *Perspektif*, 9(1), 54–65. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31289/perspektif.v9i1.2864>
- Jannah, E. M., Permana, D., Warman, R., & Daniel, M. (2022). Analisis Peran Korporasi Petani dalam Pembangunan Kawasan Pertanian. *Jurnal Pertanian Agros*, 24(3).
- Kinasih, T. S., Widiyanto, & Suminah. (2021). Kinerja Penyuluh Pertanian dalam Pelaksanaan Program Komando Strategis Pembangunan Pertanian (KOSTRATANI) di Kabupaten Sragen. *Agrica Ekstensi*, 15(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.55127/ae.v15i2.98>

- Kumalasaki, D. A. (2020). Pembangunan Pertanian Berbasis Agribisnis di Era dan Pasca Covid 19. *Jurnal Agriovet*, 2(2).
- Komariah, N., Saepudin, E., & Yusup, P. M. (2018). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 3(2), 158-174. <https://doi.org/10.26905/jpp.v3i2.2340>
- Lantarsih, R., Kresnanto, N. C., Raharti, R., Putri, W. H., Idris, M. P. A., & Fauzan, L. (2021). *Pembangunan Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Eureka Media Aksara.
- Madina, Risa Iman dkk, 2015. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Regulasi Daerah Terkait Penerimaan Pajak Reklame (Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)." 6(2):1-10.
- Mucharam, I., Rustiardi, E., Fauzi, A., & Harianto. (2022). Signifikansi Pengembangan Indikator Pertanian Berkelanjutan untuk Mengevaluasi Kinerja Pembanguna Pertanian Indonesia. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian Dan Lingkungan*, 9(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v9i2.28038>
- Mukhsin, A., Ifani, A., Manurung, A. A. B., Situmorang, D. F., & Rambe, P. R. (2021). Tingkat Partisipasi Masyarkat Kampubg Desa Jawa Desa Tebing Linggahara Baru dalam Gerakaha "Rumah Belajar" Mahasiswa/i KKN Kelompok 185 Unsu Perspektif Wahdatul Ulum. *Al Amin : Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, 4(2). <https://doi.org/doi.org/10.36670/alaman.v2i02.20>
- Mutmainnah, M., & Sugiarti, T. (2020). Persepsi dan Minat Petani Terhadap Pemanfaatan Tanaman Refugia dalam Pengendalian Hama Tanaman Padi (Studi Kasus Desa Bilaporah Kecamatan Socah Bangkalan). *Agriscience*, 1(1), 272-291. <https://doi.org/10.21107/agriscience.v1i1.8008>
- Prawoto, N. (2012). Model Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kemandirian untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Pangan. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen (Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pada Masyarakat Dieng Di Propinsi Jawa Tengah)*. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 8(2), 121-134. <https://doi.org/10.33830/jom.v8i2.276.2012>
- Pratama, D. R., & Brillian, B. (2022). Penyuluhan Pertanian dan Ambiguitas Pembangunan. *Umbara: Indonesian Journal of Antropology*, 7(1). <https://doi.org/10.24198/umbara.v7i1.36470>
- Rajagopal. (2019). *Contemporary Marketing Strategy : Analyzing Consumer Behaviour ti Drive Managerial Decision Making*. Palgrave Macmillan.
- Ramadhana, C. (2021). Strategi Pengembangan Pertanian Guna Tercapainya Ekonomi Pedesaan Berkelanjutan Melalui Sinergitas Model Penta Helix Di Desa Pettong, Kabupaten Bangkalan. *Choirun Ramadhana BEP*, 2(2), 175.
- Rois, Syamsudin. 2019. "Pengembangan Wisata Air Terjun Pletuk Desa Berbasis Ekowisata Kultural Mencapai 251 Juta Orang . Hal Ini Menandakan Bahwa Jumlah Orang Indonesia Yang." (November):1134-45. doi: 10.30998/simponi.v0i0.526.
- Ramadhana, C. (2021). Strategi Pengembangan Pertanian Guna Tercapainya Ekonomi Pedesaan Berkelanjutan Melalui Sinergitas Model Penta Helix Di Desa Pettong, Kabupaten Bangkalan. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 2(2), 175-190.

- Rohmah, S. N., & Cahyono, H. (2021). Analisis Sektor Ekonomi Potensial dan Pengembangan Wilayah Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 - 2019. *Journal Of Economics*, 1(2), 141–157.
- Soedarto, T., & Hendrarini, H. (2020). Pengembangan Perilaku Petani dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Berbasis Teknologi Informasi di Kabupaten Bangkalan Madura. *SCAN - Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 15(3), 45–48. <https://doi.org/10.33005/scan.v15i3.2264>
- Sabtimarliha. 2019. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Desa Wisata Sambi Di Dusun Sambi, Pakembinangun, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):1689–99.
- Sahyana, Yana. 2019. "Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sukamulya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat)." *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan* 157–81. doi: 10.33701/jt.v8i2.618.
- Satriawan, B., & Oktavianti, H. (2012). Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada Petani Menggunakan Model Tindakan Kolektif Kelembagaan Pertanian. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 13(1), 96–112. <https://doi.org/10.23917/jep.v13i1.185>
- Sidharta, V., Tambunan, R. M., Azwar, & Ghaniyyu, A. (2021). Suatu Kajian : Pembangunan Pertanian Indonesia. *KAIS: Kajian Ilmu Sosial*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/kais.2.2.229-232>
- Sihombing, Y. (2022). Kebijakan Pembangunan Pertanian Berbasis Inovasi Teknologi sebagai Upaya Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian Strategi Pendapatan Petani Mendukung Ketahanan Pangan. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Agribisnis VI*.
- Sofia, Suryaningrum, F. L., & Subekti, S. (2022). Peran Penyuluh pada Proses Adopsi Inovasi Petani dalam Menunjang Pembangunan Pertanian. *Jurnal Ilmiah Agribios*, 20(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.36841/agribios.v20i1.1865>
- Sumpeno, W. (2004). *Perencanaan Desa Terpadu* (2nd ed.). Read : Reinforcement Action and Development.
- Sugiharto, E. (2021). Metode Perencanaan Partisipatif Sebagai Dasar Dalam Kegiatan Penyuluhan di Desa Sarijaya Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur *SNPKM: Seminar Nasional Pengabdian*, 33–43. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/SNPKM/article/view/8046%0Ahttp://journal.unilak.ac.id/index.php/SNPKM/article/download/8046/3360>
- Yatimah, D., & Kustandi, C. (2021). Ekowisata melalui Community Empowerment sebagai Upaya Menuju Desa Wisata. *Jurnal Karya Abadi*, 5(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jkam.v5i3.16203>